Prosiding Seminar Nasional Ke-1

**Peran Ilmu ilmu Sosial dalam
Pembangunan
Indonesia Baru**

Padang, 15-16 Oktober 2014

Penyunting :

Dr. AsrinaIdi, M.Si

Drs. Syaiful, M.Si

Yayuk Lestari, Sos. MA

Muhammad Hidayat, S.Sos, MA

Rendhy Atriadi, S.Kom

**UNIVERSITAS
ANDALAS**

Prosiding Seminar Nasional Ke-1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Peran Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru

x, 854 halaman, 28 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright @2014

ISBN: 978-602-71540-0-1

Penyunting:

Dr. Asrinaldi, M.Si

Drs. Syaiful, M.Si

Muhammad Hidayat, S. Sos, MA

Rendhy Atriadi, S. Kom

Yayuk Lestari Sos. MA

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Alamat:

Kampus Limau Manis, Padang 25163

Telp/Faks. 0751-71266

Website: www.fisip.unand.ac.id

Transnasionalisme	569
Arah Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2019: Menuju Poros Maritim Dunia Oleh Anita Afriani Sinulingga (Fisip Universitas Andalas)	570-578
Masyarakat Sipil Transnasional Dan Demokratisasi Di Indonesia Oleh Virtuous Setyaka dan Febryna Mulya Forum INDERA	579-590
Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Modal Membangun Indonesia Baru Oleh Hendar Putranto (Universitas Multimedia)	591-609
Strategi Marketing Public Relations PT Garuda Indonesia pada Program GFF (Garuda Frequent Flyer) Oleh Shitta Afrinadia dan Refika Mastanora (Fisip Universitas Andalas)	610-617
Pemerintahan Lokal	618
Model Pemberdayaan Institusi Lokal dalam Pemanfatan Remitan Migran Internasional Asal Sumatera Barat Oleh Indraddin, Wahyu Pramono, Dwiyanto Hanandini dan Anggraini Primawati (Fisip Universitas Andalas)	619-636
Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam (Suatu Deskripsi Inter-Relasidan Kesiapan Para Pihak dalam rangka Rehabilitasi-Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa di Kabupaten Tanah Datar) Oleh Edi Indrizal (Fisip Universitas Andalas)	637-657
Revitalisasi Peran Tradisional Penduduk Lansia Dalam Keluarga Dan Komunitas Di Daerah Rawan Bencana Oleh Pawennari Hijjang (Universitas Hasanudin)	658-668
Efektivitas Komunikasi Humas Melalui Media Sosial Oleh Multia Qairanni (Fisip Universitas Andalas)	669-682
Analisa Game Theory Politik Lokal Dana Perimbangan Propinsi Jawa Barat Oleh Tamrin (Fisip Universitas Andalas)	683-694
Civil Sociality	695
Warung Tenda Payung Ceper (Analisis Sosiologi Perilaku Menyimpang di Pantai Padang) Oleh Wahyu Pramono dan Machdaliza (Fisip Universitas Andalas)	696-721
Kontestasi Ruang Ekonomi Kota : Studi Konflik Perebutan Ruang Ekonomi di Pasar Raya Padang Oleh Firdaus (STKIP PGRI Sumatera Barat)	722-729
Ketidaksinambungan Program Millenium Development Goals di Pemerintahan kota Padang Oleh Amelia Arnis dan Vioni Fauzia (Fisip Universitas Andalas)	730-737

**KONTESTASI RUANG EKONOMI KOTA;
Studi Konflik Perebutan Ruang Ekonomi di Pasar Raya Padang**

Firdaus

*Program Studi Pendidikan Sosiologi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) PGRI Sumatera Barat.*

daus_gila@yahoo.com

085263881221

ABSTRACT

Both Development and society resistance are a set of city paradoxes in developing countries, including Indonesia. The paradox causes the conflict of space contestation between the government and traders. In many cases struggle for space in the cities of Indonesia, economic struggle for space is the dominant cases, both in cities and small towns. In Pasar Raya Padang, economic space contestation occurred between traders and city government. The contestation led to violence by government officials. The violence such is like hitting, dragging and fired tear gas to traders. Genealogically, the contestation processes has been going since five years ago, especially after the fall of the building market in earthquake of 2009 in West Sumatera. This research article uses qualitative approach located in Padang. It describes the economic space contestation between city government and traders in market rehabilitation post disaster. This article also examines the motif and strategy of contestation economic space between government and traders

Kata Kunci : *Konflik, Kontestasi, Ruang Ekonomi.*

Pendahuluan

Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in revolutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes.

(Karl Marx, 1848)

Rabu, tanggal 31 Agustus 2011 sejatinya adalah hari berbahagia bagi warga kota Padang, terutama pemeluk agama Islam. Hari itu adalah hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H yang dalam pandangan teologi Islam merupakan hari kemenangan. Dalam tradisi masyarakat kota Padang, moment Idul Fitri kerap dijadikan sebagai waktu bersilaturahmi dengan keluarga besar yang tidak sempat dikunjungi sepanjang tahun. Alih-alih melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan keluarga, sebagian besar warga yang berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional blok II, III dan IV, Pasar Raya Padang harus berjaga-jaga di kios tempat mereka berdagang. Kegiatan menjaga kios tersebut sudah dilakukan pedagang sejak pertengahan tahun 2011 dengan sistem ronda. Ronda dimulai dari pagi hingga malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga kios pertokoan dari rencana perobohan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.

Perobohan bangunan pasar Inpres II, III dan IV yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang adalah untuk melakukan pembangunan ulang karena pasar tersebut mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2009. Pemerintah Kota berencana membangun pasar tradisional yang rusak tersebut dengan bangunan pasar modern. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan meminta semua pedagang yang merupakan pemilik kios dan toko keluar dari kios mereka untuk kemudian dibangun gedung yang baru. Setelah pembangunan gedung yang baru selesai dibangun, semua pedagang diharuskan membayar untuk mendapatkan gedung baru dengan harga tertentu. Sistem

pembangunan seperti demikian tidak disepakati oleh pedagang karena memberatkan mereka. Dengan alasan memberatkan tersebut, pedagang lebih memilih pasar tidak dibangun baru dan lebih memilih menggunakan bangunan pasar yang lama dengan alasan masih layak pakai (Firdaus, 2014)

Penolakan yang terus dilakukan oleh pedagang membuat pemerintah kota Padang memilih upaya paksa dalam perobohan bangunan. Selepas shalat Idul Fitri 2011, Pemerintah Kota Padang dengan melibatkan TNI, Polisi, Satpol PP dan dinas Perhubungan melakukan upaya paksa dalam perobohan bangunan pasar. Upaya perobohan mendapatkan perlawanan dari pedagang. Dalam realitas PBHI Sumbar tanggal 1 September 2011, disebutkan bahwa pedagang pasar mendapatkan perlakuan kekerasan dari aparat pada hari itu. Kekerasan dilakukan oleh aparat dalam proses pengamanan pemagaran untuk melakukan pembongkaran gedung Inpres II, III dan IV atas permintaan Pemerintah Kota Padang. Puluhan pedagang menjadi korban. Kekerasan dilakukan dengan cara memukul, menyeret dan menembakkan gas air mata kepada para pedagang yang berada dalam posisi mempertahankan hak mereka. Akibat kekerasan, beberapa orang pedagang mengalami luka memar, lebam, terkilir dan sesak nafas¹⁴⁹.

Peristiwa kekerasan di hari raya ini adalah puncak dari rentetan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang untuk merobohkan pasar tradisional untuk dibangun pasar yang baru. Peristiwa tersebut juga sekaligus satu dari rangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang dalam merebut pasar dari tangan pedagang untuk dibangun dengan skema yang baru. Di sisi lain, perlawanan pedagang adalah satu dari rentetan peristiwa perlawanan panjang pedagang Pasar Raya dalam mempertahankan tempat berdagang mereka dari upaya pemerintah kota Padang membangun ulang pasar dengan skema yang tidak mereka setujui. Implikasinya, perebutan ruang antara pemerintah kota dengan pedagang terus berlanjut dan melahirkan konflik dalam berbagai bentuk.

Konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang kemudian berujung pada kekerasan adalah peristiwa berulang dalam proses pembangunan di Indonesia. Baik pembangunan di kota maupun di desa. Di perkotaan, upaya-upaya pemaksaan pembangunan oleh pemerintah merupakan bagian dari paradoks kota di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mengutip Basundoro, paradoks kota seperti ini mulai mengemuka ketika liberalisme ekonomi mulai menggejala di perkotaan. Eksploitasi kolonial telah menyebabkan kota-kota dianggap sebagai bagian dari alat untuk mendatangkan keuntungan. Dalam konteks ini, modernisasi kota-kota di daerah jajahan tidak bisa dipisahkan dengan upaya menjajah untuk menjadikan kota sebagai wilayah untuk mencari keuntungan melalui industrialisasi dan perdagangan. Secara faktual fenomena di atas telah mulai terjadi di kota-kota di Indonesia pada akhir abad ke-19. Kota-kota di Jawa seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang mulai mengalami berbagai persoalan ketika terjadi perubahan yang amat drastis dari kota tradisional menuju ke kota kolonial (Basundoro, 2013:6-7).

Perseteruan antara pedagang dan pemerintah dalam pembangunan pasar kerap menuai protes dan berujung pada konflik antara dua kelompok ini. Perlawanan rakyat miskin kota dalam rangka memperoleh ruang untuk hidup muncul dalam bentuk yang amat beragam, terutama di negara dunia ketiga dimana kemampuan negara untuk mengelola rakyat miskin amat terbatas serta tingginya angka urbanisasi di kota-kota besar. Kasus semacam ini banyak muncul di Amerika Latin, Asia Selatan dan Tenggara, serta di Afrika (Basundoro, 2013:6). Bank Dunia dalam laporan pembangunan dunia tahun 2011 bahkan menyebutkan bahwa kebanyakan konflik dan kekerasan di negara berkembang adalah peristiwa yang berulang. *Many countries and subnational areas now face cycles of repeated violence, weak governance, and instability* (World Bank, 2011:2).

Melihat proses perebutan ruang yang terjadi antara pemerintah kota dengan pedagang pasar yang sudah berlangsung sejak pasca bencana 2009, memperlihatkan adanya suatu pertarungan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak yang berkontestasi terhadap objek yang sama, yaitu ruang ekonomi. Tulisan yang dipetik dari hasil penelitian ini akan membahas perebutan ruang sebagai sumber ekonomi antara pemerintah kota Padang dengan pedagang pasar raya Padang dalam proses pembangunan kota. Pembahasan dalam tulisan ini akan mendeskripsikan motif dan strategi yang digunakan oleh kedua kelompok dalam berkontestasi

¹⁴⁹ <http://www.pbhisumbar.org/2011/09/siaran-pers.html>. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Hari yang Fitri. (diakses tanggal 1 Desember 2013)

TINJAUAN PUSTAKA

Pasca bencana gempa Sumatera Barat 2009 yang melahirkan kompleksitas masalah pembangunan di pasar Raya Padang, banyak studi telah dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen dan peneliti di Pasar Raya Padang. Studi-studi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda. Studi yang penulis lakukan pada tahun 2011 mengungkap faktor penyebab lahirnya protes dari pedagang bencana terhadap pembangunan ulang Pasar Raya Padang pasca bencana. Studi ini menemukan bahwa penyebab utama protes pembangunan adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasar pasca bencana. Kebijakan tersebut adalah pembanguna kios darurat pada masa tanggap darurat yang dianggap merugikan pedagang. Kedua kebijakan pembangunan ulang pasar Inpres I, II, III dan IV yang dianggap oleh pedagang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang dan keluar dari konteks penanggulangan bencana. Ketiga adalah pembangunan Fase VII lantai II dan III yang mengharuskan pengosongan pada lantai I (Firdaus, 2014).

Studi lain dilakukan oleh Ariesta tentang peran perempuan dalam proses resolusi konflik rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya. Dalam studinya, Ariesta menyatakan bahwa perempuan tidak dapat berperan hingga menembus proses resolusi konflik secara formal dalam perundingan bahkan dalam konteks sistem matrilineal. Perempuan berperan terbatas pada tahap pra konflik, konfrontasi hingga krisis pada konflik rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang ini dengan melakukan tindakan-tindakan kolektif. Perempuan dapat berperan dikarenakan mereka memiliki kepentingan yang tidak terlepas dari peran mereka dalam sistem sosial (Ariesta, 2014).

Tulisan dalam artikel ini berbeda dengan dua tulisan di atas dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Pasar Raya Padang. Tulisan penulis sebelumnya fokus melihat faktor penyebab terjadinya konflik antara pedagang dengan pemerintah kota Padang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasar pasca bencana. kemudian, tulisan yang ditulis oleh Ariesta lebih fokus pada keterlibatan perempuan dalam upaya resolusi konflik. Dua tulisan ini baik secara eksplisit maupun implisit tidak menjelaskan dengan baik motif perebutan ruang ekonomi dan strategi yang digunakan oleh dua kelompok yang berkonflik dalam proses perebutan ruang tersebut. Tulisan ini akan berfokus menjelaskan motif dan strategi perebutan ruang dengan menggunakan pendekatan konflik.

METODOLOGI

Data dalam artikel ini adalah data kualitatif hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2014 dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dinamika tarik ulur yang terjadi antara pemerintah kota Padang dengan pedagang dalam proses pembangunan Inpres II, III dan IV di Pasar Raya Padang. Dinamika tersebut mengindikasikan adanya proses perebutan ruang ekonomi antara kedua kelompok di Pasar Raya Padang. Dengan pendekatan studi kasus, maka ia dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang sudah ditentukan (Stake, 1995 dalam Creswell, 2010:20). Data penelitian dikumpulkan dalam rentang waktu Maret-Mei 2014 di di Pasar Raya Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah pedagang yang terlibat dalam perebutan ruang dan kuasa hukum pedagang. Adapun studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen pemberitaan media, bahan tertulis di PBHI Sumbar sebagai kuasa hukum pedagang. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti Miles dan Huberman sejak pra penelitian hingga penulisan laporan.

EKONOMI DAN PERJUANGAN KELAS: MOTIF PEREBUTAN RUANG

Amanda Root secara sederhana mendefinisikan Pasar sebagai, *mediums where exchanges can take place* (Root, 2007:33-34). Bagi Harvey, ruang dan waktu harus dianggap sebagai kategori dasar eksistensi manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari proses material. Untuk memahami ruang dan waktu, dengan mengikuti Harvey, seseorang mesti melakukan investigasi proses dan kebiasaan material sebagai memproduksi ulang kehidupan sosial. Setiap cara produksi akan melahirkan konsepsi kepemilikan ruang dan waktu (Zieleniec, 2007:99). Pasar, sebagai sebuah ruang tempat berlangsungnya aktifitas ekonomi –dengan mengikuti konsep Root- akan menjadi menjadi arena

dimana kepentingan dan hubungan ekonomi saling berkaitan ia sekaligus akan menjadi dasar eksistensi manusia sebagai *homo economicus* yang menggantungkan kehidupan mereka di sana.

Teori klasik Steward mengatakan bahwa pada berbagai suku bangsa berburu – meramu (*hunting – gathering*), variasi komposisi jumlah anggota suatu kelompok, sangat ditentukan oleh sumber alam yang ada di sekitarnya dan siklusnya; ada yang besar jumlah anggotanya dan ada pula yang kecil (Poerwanto, 2005). Kemampuan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tergantung pada terlibatnya mereka dalam hubungan sosial dengan orang lain untuk mengubah lingkungan materil melalui kegiatan produktifnya. Hubungan-hubungan sosial yang elementer ini membentuk infrastruktur ekonomi masyarakat (Johnson, 1994:146). Salah satu infrastruktur ekonomi penting dalam diskursus ekonomi adalah pasar.

Pasar Raya Padang sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, menunjukkan entitasnya sebagai ruang yang kemudian menjelma menjadi ruang ekonomi. Kenapa ruang ekonomi? Karena pasar bagi para pedagang, kuli angkat, tukang gerobak, pemulung dan sebagainya adalah tempat dimana mereka menggantungkan kebutuhan ekonomi. Di pasar mereka mempertaruhkan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga pasar kemudian bagi mereka adalah ruang utama sebagai tempat mencari nafkah. Keberadaan Pasar Raya Padang sebagai sebuah ruang ekonomi sudah dimulai sejak zaman kolonial. Lokasi Pasar Inpres I sekarang, pada zaman kolonial Belanda merupakan tanah lapang tempat warga berkumpul dan bermain. Tempatnya persis di belakang kantor pemerintahan yang sampai tahun 2013 merupakan kantor Walikota Padang. Meskipun pusat perdagangan sudah ada di kawasan kota lama sekarang, namun tanah lapang yang sering dijadikan sebagai tempat berkumpul kemudian menjelma menjadi Pasar. Sekitar tahun 70-an, bangunan pasar Inpres I, II, III, IV dibangun oleh pemerintah kota. Pada bangunan tersebut kemudian diberikan hak pakai kepada pedagang dengan identitas yang dicantumkan dalam sebuah kontrak yang disebut sebagai kartu kuning. Dengan modal kontrak dalam kartu kuning tersebut kemudian pedagang menjadikan pasar sebagai ruang dimana mereka menggantungkan kehidupan mereka.

Kini, dengan ketersediaan lahan seluas 71.375m², Pasar Raya Padang merupakan pasar paling luas dari 15 pasar yang ada di kota Padang¹⁵⁰. Selain terluas, Pasar Raya Padang berada di pusat kota dengan nilai tanah Rp 5.000.000/meter. Nilai tersebut merupakan nilai tanah tertinggi dari seluruh pasar yang ada di kota Padang. Harga tersebut sekaligus menempatkan Pasar Raya Padang sebagai kawasan paling bernilai ekonomis dibanding tanah di pasar lain. Dengan nilai ekonomis paling tinggi, pasar adalah ruang paling penting dalam dinamika ekonomi. Dengan fungsi ekonomi yang strategis, pasar akan terus menjadi rebutan berbagai kelompok pelaku ekonomi. Basundoro (2013:23) mengatakan bahwa semakin banyak individu atau kelompok ingin mengakses ruang yang sama, maka semakin tinggi ketegangan yang melanda ruang tersebut. Jika kota (secara spesifik pasar_pen) diasumsikan sebagai ruang yang paling banyak diminati oleh manusia, maka ketegangan di kota (pasar_pen) jauh lebih besar dan intensif dibandingkan tempat lain.

Keterbatasan ruang yang dimiliki oleh pasar tidak mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan semua kelompok sekaligus secara bersamaan. Oleh karenanya, ruang yang terbatas kemudian menjadi rebutan. Dalam konteks ini asumsi utama teori konflik yang ditawarkan oleh Alison dan Wallace dimana manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya (Wirawan, 2012:61) menjadi tak terbantahkan. Artinya, bagi kelompok yang berkepentingan terhadap ruang yang tersedia di Pasar Raya Padang akan melakukan upaya apapun untuk kepentingan-kepentingan tersebut.

Pasca bencana gempa Sumatera Barat 2009 yang berimplikasi terhadap robohnya keseluruhan bangunan pasar inpres I dan sebagian inpres II, dan bangunan pasar yang lain mengalami kerusakan, menjadi peluang bagi kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan pasar. Kelompok tersebut terutama adalah pemilik modal yang ingin berinvestasi dalam membangun ulang pasar yang roboh. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasar, kemudian menjadi bagian dari skema investasi padat modal dan berorientasi keuntungan. Dengan

orientasi keuntungan yang dibangun oleh investor, pembangunan ulang pasar kemudian mengabaikan kelompok “keropos” modal.

Dengan logika pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasar dilakukan dengan tanpa memperhatikan kepentingan kelompok “keropos” modal karena kelompok padat modal sudah mengajukan minat dalam membangun ulang pasar pasca bencana. Tidak heran jika pada hari ke-23 pasca bencana 1.100 unit kios dibangun oleh pemerintah kota melibatkan TNI Yon Zikon 13/kf dengan bekerjasama nilai kontrak Rp. 2.4 milyar di jalan yang mengelilingi pasar Inpres I, II, III dan IV. Jika penampungan dijadikan alasan sebagai tempat penampungan pedagang korban bencana Inpres II, maka jumlah 1.100 jauh melebihi kebutuhan korban yang hanya 445 orang (Firdaus, 2014:33). Dalam prakteknya kemudian, kios yang dibangun melebihi jumlah korban bencana di Inpres I, dipakai oleh pedagang baru dengan sistem sewa.

Selain pembangunan kios darurat, pembangunan ulang Inpres I yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD dibangun dengan sistem dimana pedagang yang menjadi korban bencana harus membayar untuk mendapatkan kembali kios mereka. Selain membayar, luas kios yang dibangun untuk mereka berukuran kecil dan tidak sesuai dengan kios mereka sebelumnya. Tidak hanya pembangunan kios darurat dan Inpres I, pembangunan ulang pasar Inpres II, III dan IV yang tidak roboh seperti Inpres I diperlakukan sama. Bangunan yang masih kokoh dan kuat dirobohkan untuk dibangun baru dengan aturan yang sama, pedagang harus membayar untuk mendapatkan kembali kios mereka sesuai dengan lokasi dan luas bangunan yang disediakan. Dengan sistem pembangunan yang mewajibkan pedagang harus membayar untuk mendapatkan kembali tempat berdagang mereka, dan luas kios dengan ukuran yang lebih kecil dan sesuai dengan kondisi awal menunjukkan logika investasi berorientasi keuntungan melatari pembangunan ulang pasar yang roboh.

Pedagang sebagai korban bencana, menilai pembangunan kios merugikan mereka secara ekonomi karena keberadaan kios yang memenuhi seluruh jalan menghambat akses pembeli ke kios dan toko mereka. Kemudian, mekanisme pembangunan yang mengharuskan mereka membayar untuk mendapatkan kembali kios mereka yang sudah roboh, dinilai merugikan mereka. Dengan alasan sistem pembangunan merugikan, pedagang menolak perobohan pasar untuk dibangun baru dan lebih memilih untuk bertahan di bangunan lama.

.....jika pembangunan ulang mengharuskan kami membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kembali kios dan los kami, lebih baik pasar dibiarkan begini saja. Toh bangunan pasar ini masih tetap bisa kami gunakan untuk berdagang. Kan hanya dinding saja yang mengalami kerusakan.... (wawancara AY_laki-laki, 13 Maret 2014)

Tidak hanya bertahan di bangunan lama, pedagang juga meminta bangunan kios darurat yang menghambat akses pembeli ke kios dan toko mereka dan menjadi penyebab menurunnya penjualan dan berimplikasi terhadap keuntungan yang mereka peroleh dalam kegiatan perdagangan. Di sisi lain, keberadaan kios yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan, digunakan oleh pedagang yang bukan korban bencana. Pedagang sangat tahu pemanfaat kios darurat bukanlah pedagang korban bencana dan mereka menggunakan kios dengan sistem sewa.

Meskipun logika yang digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan Pasar Raya Padang pasca bencana adalah penataan ulang, namun mekanisme pembangunan pasca bencana sudah diatur oleh undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 60 ayat 1 undang-undang ini mengatur bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam artian, UU ini mengatur bahwa penanggulangan bencana tidak boleh menggunakan dana investasi pihak ketiga yang berorientasi keuntungan. Dengan logika penanggulangan bencana harus ditanggung oleh pemerintah, maka sejatinya pembangunan ulang Pasar Raya Padang tidak meminta pedagang membayar untuk mendapatkan kembali los, kios atau toko mereka yang roboh sebelumnya. Dan pedagang sebagai korban bencana tidak seharusnya membayar untuk mendapatkan kembali los, kios dan toko mereka yang dibangun ulang oleh pemerintah.

Kesadaran pedagang akan hak mereka sebagai korban bencana dan pengalaman masa lalu dalam beberapa proses pembangunan di kota Padang, melahirkan keinginan bersama untuk bertahan dengan

keyakinan mereka. Keyakinan tersebut tumbuh bersamaan dengan kesadaran mereka akan status mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dalam mengakses ruang ekonomi yang sebelumnya mereka kelola melalui perjanjian. Kesadaran akan status ini yang oleh Marx disebut sebagai kesadaran kelas yang mendorong pedagang untuk tetap mempertahankan ruang ekonomi mereka. Di sisi lain, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan sengaja menutup kesadaran kelas pedagang dengan berbagai cara melalui kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya.

Kompetisi terjadi karena berbagai bentuk sumber dalam berbagai setting, akan tetapi sumber kekuasaan dan kekuasaan dan ekonomi merupakan sumber utama yang menyebabkan munculnya kompetisi (Sanderson, 2009:662). Keinginan pemerintah kota membangun pasar dengan sistem membayar dengan logika investasi, dan pilihan pedagang untuk tetap bertahan di bangunan lama ketimbang mendapatkan bangunan baru dengan sistem membayar, menunjukkan pasar sebagai arena kontestasi tar dua kelompok yang berkeinginan terhadap ruang ekonomi paling penting. Implikasi dari perebutan ruang ini kemudian merembes ke aspek pembangunan kota yang lain. Salah satu implikasinya adalah kesemrautan kota yang berlarut sehingga pasar tidak lagi nyaman sehingga warga tidak mendapatkan ruang berbelanja yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan mereka.

DARI DEMONSTRASI HINGGA NEGOSIASI; STRATEGI KONTESASI

Sarjana-sarjana gerakan sosial menggunakan konsep *tactical repertoires of contention* untuk menjelaskan strategi-strategi yang digunakan oleh aktor-aktor kolektif untuk meyakinkan atau memaksa penguasa mendukung tuntutan-tuntutan mereka. Kumpulan taktik gerakan sosial tersebut antara lain mencakup strategi bujuk rayu politik yang bersifat konvensional seperti lobby, voting, dan petisi; taktik konfrontasi seperti berbaris, mogok dan demonstrasi publik yang mengacaukan kehidupan sehari-hari; aksi kekerasan seperti pemboman, kerusuhan, pembunuhan dan perampasan yang berdampak terhadap kerusakan materi dan ekonomi dan kehilangan kehidupan; dan eksperisi politik berdasarkan kebudayaan seperti ritual, musik, seni, teater, *street performance* dan praktek kehidupan harian yang menginspirasi solidaritas dan kesadaran oposisi (Taylor, 2009:779).

Stephen K. Sanderson (2009:662) mengatakan bahwa konflik mengandaikan perjuangan antara individu dan kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda atau berkompetisi untuk sumber-sumber yang langka yang merupakan pokok kehidupan sosial. Proses kontestasi ruang ekonomi di kota Padang yang melibatkan pemerintah kota sebagai pengambil kebijakan dan pedagang sebagai korban bencana telah melalui menggunakan ketiga taktik umum yang digunakan oleh sarjana gerakan sosial seperti diuraikan di atas.

Strategi bujuk rayu politik digunakan oleh pedagang melalui proses lobby ke DPRD Padang sebagai representasi warga. Hasil lobby yang dilakukan oleh pedagang ke DPRD bahkan melahirkan rekomendasi dari komisi II, bidang ekonomi kepada pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan diamanahkan oleh undang-undang kebencanaan. Namun, oleh pemerintah kota, rekomendasi DPRD hanya sebatas rekomendasi yang tidak harus dilakukan. Lobby tidak hanya dilakukan oleh pedagang korban bencana, akan tetapi pemerintah kota juga melakukan lobby dengan legislatif untuk mendukung pembangunan ulang pasar dengan mekanisme pungutan bayaran dari pedagang.

Strategi konfrontasi yang dilakukan oleh kedua kelompok terjadi secara berhadapan-hadapan. Beberapa demonstrasi dilakukan oleh pedagang korban bencana ke kantor DPRD dan Balaikota. Demonstrasi pertama dilakukan oleh pedagang saat pembangunan kios darurat dibangun pada hari pertama. Demonstrasi-demonstrasi berikutnya terus dilakukan oleh pedagang secara damai dengan metode *long march* dari Balaikota ke kantor DPRD. Demonstrasi juga dilakukan oleh pemerintah kota dengan membentuk demonstrasi tandingan untuk *counter* aksi massa yang dilakukan oleh pedagang korban bencana.

Aksi kekerasan malah dilakukan oleh pemerintah kota dalam merespon demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang. Lima orang pedagang ditangkap dengan tuduhan merusak rumah dinas walikota dalam unjuk rasa. Puluhan pedagang disemprot dengan water canon yang dipersiapkan untuk menghadapi demonstrasi. Aksi kekerasan yang paling buruk adalah peristiwa tanggal 31 Agustus 2011 yang bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri seperti sudah disinggung pada bagian awal. Sebaliknya, pedagang sendiri yang memiliki banyak massa malah tidak melakukan kekerasan kecuali untuk merespon kekerasan yang mereka alami.

Kekerasan yang dialami oleh pedagang terutama perempuan pada hari raya telah menarik perhatian dari semua kelompok atas keinginan pemerintah kota yang sudah melampaui batas. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, seniman, mahasiswa dan orang-orang dari berbagai latar belakang menyatakan kecaman terhadap pemerintah kota yang melakukan kekerasan yang tidak semestinya mereka lakukan. Hal ini kemudian bermuara pada adanya proses argumentasi persuasif seperti yang diperkenalkan oleh Pruitt dan Rubbin. Argumentasi persuasif adalah upaya kedua kelompok meyakinkan kelompok lain dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki hak yang sah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya dari kontroversi (Pruitt dan Rubbin, 2004:112).

Proses argumentasi persuasif ini kemudian menggiring kedua belah pihak melakukan negosiasi dan perundingan. Pedagang korban bencana dalam proses perundingan untuk mempertahankan haknya meminta didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat sebagai kuasa hukum. Dalam proses perundingan, kedua belah pihak tetap bertahan dengan keinginan mereka, namun pada beberapa bagian sudah dinegosiasikan. Pemerintah kota tetap ingin membangun ulang pasar dan mekanisme pedagang harus membayar untuk mendapatkan kembali tempat berdagang mereka. Sementara di sisi lain, pedagang setuju pembangunan ulang dengan syarat mereka mendapatkan kembali tempat mereka berdagang tanpa harus membayar. Tarik ulur dalam proses negosiasi yang dimediasi oleh komnas HAM kemudian melahirkan kesepakatan antara kedua kubu yang berkontestasi. Hasil mediasi kemudian melahirkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada 8 November 2011 dengan poin utama kesepakatan bahwa pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah kota dengan biaya APBD dan atau APBN dan pedagang mendapatkan kembali tempat mereka berdagang setelah pembangunan dengan tanpa membayar. Sementara proses pembangunan dilaksanakan, pedagang disediakan tempat penampungan sementara untuk berdagang.

MEMBANGUN KOTA BERSAMA WARGA; CATATAN AKHIR

Poerwanto (2005:241) menyebutkan bahwa pembangunan adalah mengolah sumber daya alam dan manusia serta interaksi antara keduanya. Namun di sisi lain evaluasi terhadap model-model pembangunan dunia ketiga yang minim dalam pemberdayaan dan lebih mengutamakan pertumbuhan menunjukkan adanya suatu dimensi yang "tertinggal" dari proses pelaksanaan pembangunan. Dimensi yang tertinggal itu bisa dari aspek sosial, budaya, psikologis, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan menuai banyak kritik dari berbagai kelompok masyarakat. Termasuk pembangunan ulang pasar raya pasca bencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunan banyak kepentingan, namun pemerintah dalam proses pembangunan sejatinya tidak mengambil bagian dalam pertarungan atas sumber ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan yang didominasi oleh pemerintah –terutama yang sarat dengan kepentingan investasi- dalam kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan yang ada dalam masyarakat. Akibatnya pembangunan yang dilaksanakan tidak merubah keadaan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan perlu didekatkan pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat setempat, pelaksanaan pembangunan perlu mengikuti mekanisme dari, oleh, serta dan untuk masyarakat. Pola ini menurut Chambers (1987:199) disebut pola pemberdayaan masyarakat, yaitu sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan *people centred, participatory, empowering dan sustainable*.

Masyarakat kota, dengan kompleksitas persoalan yang mereka hadapi setiap hari dan cepatnya arus informasi memiliki pengetahuan yang lebih ketimbang masyarakat pedesaan yang arus informasi lebih lambat. Dengan pengetahuan yang lebih, konsep yang ditawarkan oleh Chambers (meskipun pada dasarnya Chambers menawarkan konsep ini untuk pembangunan pedesaan) akan lebih mudah dilaksanakan. Dalam konteks ini bekerja dengan komunitas¹⁵¹ akan sangat memungkinkan dilakukan dalam pembangunan di perkotaan. Secara umum dikenal tiga bentuk aktifitas dengan komunitas (*community practice*), yaitu *social action, social planning, dan community development*. Pola ini

¹⁵¹ Konsep bekerja dengan komunitas merupakan bagian dari pembangunan berbasis komunitas yang secara sederhana dapat difahami sebagai aktifitas pembangunan yang mengutamakan aktifitas komunitas sebagai pelaku utama. (Lihat Syahyuti (artikel), 2005)

sudah selayakannya digunakan dalam proses pembangunan apapun di perkotaan, sehingga pembangunan menjadi bagian dari warga kota. Atau sebaliknya, pembangunan mendapat protes dari warga kota. *Wallahua 'lam.*

DAFTAR BACAAN

- Ariesta, Ira, 2014. *Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Nomor 2, Volume I tahun 2014, Hal 41-51. Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang.
- Basundoro, Purnawan, 2013. *Merebut Ruang Kota; Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an*. Margin Kiri, Tangerang Selatan.
- Cernea, Michael M, 1988. *Mengutamakan Manusia Dalam pembangunan, Variabel-variabel Sosiologi dalam Pembangunan*. UI-Presss, Jakarta.
- Chamber, Robert, 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES, Jakarta.
- Johnson, Dayle Paul, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terj)*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Firdaus, 2014. *Protes Korban Bencana; Studi Konflik Penenggulan Bencana di Pasar Raya Padang*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Nomor 2, Volume I tahun 2014, Hal 27-39. Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang.
- Marx, Karl & Frederick Engels, 1970. *Manifesto of Communist Party*. Foreign Languages Press, London.
- Poerwanto, Hari, 2005. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pruit, Dean G & Jeffrey Z. Rubin, 2004. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ritzer, George (ed), 2009. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Blackwell Publishing, USA
- Root, Amanda, 2007. *Market Citizenship; Experiments in Democracy and Globalization*. Sage Publication, Los Angeles.
- Wirawan, I.B, 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial, Defenisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Kencana, Jakarta.
- World Bank, 2011. *World Development Report 2011: Conflict, Security and Developmnet*. The World Bank.
- Zieleniec, Andrzej, 2007. *Space and Social Theory*. Sage Publication., London.